

Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru

M. Rizki Setiawan¹ Kartius²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution

No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

Muhammadrizki07@student.uir.ac.id kartius@soc.uir.ac.id

Received : September 20, 2024;

Accepted : 10 Desember 2024

Abstract

Based on the results of observations in the field, it is known that there are limited facilities and infrastructure for disaster management in the city of Pekanbaru. Disaster management is still not optimal due to limited human resources if a disaster occurs at the same time. This research aims to determine the implementation of the Disaster Management Program by Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). This research is qualitative research. Based on research conducted regarding the Implementation of the Disaster Management Program by Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), it is known that if a disaster occurs, a meeting will be held with several related agencies, for example the city government, forkompinda and others to discuss and take action. what should be done. Resources in terms of human resources are not yet ideal in terms of numbers and in terms of education, no one has disaster education, while in terms of facilities it is still very lacking, so many facilities are on loan from other agencies. The disposition is seen from the support for improving facilities and infrastructure which is currently urgently needed by the Disaster Management Program by Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). The bureaucratic structure dividing authority is absolutely responsible for providing disaster assistance in Pekanbaru City.

Key Words : Implementation, Disaster Management, and Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Abstrak

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan di ketahui bahwa Terbatasnya sarana dalam penanggulangan bencana dikota Pekanbaru. Penanganan bencana masih belum maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia jika terjadi bencana dalam waktu bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru diketahui bahwa Komunikasi dilakukan jika terjadi bencana, maka akan di adakan rapat dengan beberapa instansi terkait misal dengan pemerintah kota, forkompinda dan lain lain untuk membahas dan mengambil tindakan yang sebaiknya di lakukan. Sumberdaya dari sisi sumber daya manusia belum ideal dari sisi jumlah dan dari sisi pendidikan tidak ada yang memiliki kependidikan kebencanaan sedangkan dari sisi fasilitas masih sangat kurang sehingga banyak fasilitas yang berstatus pinjam dari instansi lainnya. Disposisi dilihat dari dukungan peningkatan sarana yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Struktur Birokrasi pembagian kewenangan secara mutlak beratnggung jawab untuk memberikan pertolongan kebencanaan di Kota Pekanbaru.

Key Words : Implementasi, Penanggulangan Bencana, Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD)

M. Rizki Setiawan dan Kartius

Pendahuluan

Di Indonesia sendiri bencana banjir hampir setiap musim terjadi. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan diatas normal dan pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, juga pembuangan sampah kedalam sungai, dan pembangunan pemukiman didaerah dataran rendah. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena pasokan air masuk kedalam sistem aliran menjadi tinggi melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi. Hal ini menyebabkan terjadi kekacauan terhadap sistem pengaliran air. Selain itu berkurangnya daerah resapan juga merupakan kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. Disamping pemahaman bencana yang bertitik tolak berdasarkan keseimbangan alam dan terdapat pemahaman yang berdasarkan keseimbangan lingkungan. Maka dari itu untuk menyikapi ancaman tersebut, Pemerintah berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air.

Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari unsur organisasi BPBD. Sebagaimana diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kondisi geografis, geologis, dan demografi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik karena faktor alam, non alam, maupun manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian lingkungan hidup. sifat dan dampak psikologis dalam keadaan tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Pekanbaru adalah Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan penanggulangan bencana di Kota Pekanbaru dan tugas pemantauan lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, adapun tugas dan fungsi dalam rincian adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana.
4. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi tugas penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana.
5. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang penanggulangan bencana.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021 pada:

Pasal 3 :

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

1. Cepat dan tepat:
2. Prioritas:
3. Koordinasi dan keterpaduan:
4. Berdaya guna dan berhasil guna:
5. Transparansi dan akuntabilitas:
6. Kemitraan:
7. Pemberdayaan:
8. Non diskriminatif: dan
9. Non proletisi.

Upaya Badan Penanggulan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir, yaitu : Pertama, Sosialisasi persiapan menghadapi banjir. Sosialisasi ini dilakukan untuk masyarakat Pemerintah Kota Pekanbaru supaya lebih tahu bagaimana persiapan menghadapi banjir di Kota Pekanbaru. Supaya disaat bencana banjir dating masyarakat tidak terkejut. Kedua, Tindakan pasca banjir. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang/sector lain. (Inggit Awalia Pratiwi, 2021: 3). Banjir merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengolah alam. Proses alamiah sangat bergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah (geohidrologi), struktur batuan, geomorfologi dan tipypografi lahan dan aktivitas manusia terkait dengan prilaku mengeksploitasi alam untuk kesejateraan manusia, sehingga akan cendrung merusak lingkungan (Kletus Marselinus Wurin, 2022 :537)

Kota Pekanbaru mempunyai satu sungai utama yaitu Sungai Siak yang memiliki panjang 370 km, panjang 20-30 meter, dan lebar 100-150 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budidaya ikan, dan irigasi. Sedangkan wilayah dataran rendah Kota Pekanbaru umumnya terdiri atas lahan rawa gambut, sungai aluvial, dan dataran banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru menyebutkan, berikut kecamatan yang paling rentan terkena banjir:

Tabel 1.

Data Bencana Banjir di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023

1	Kecamatan Bukit Raya	6	-	-	1
2	Kecamatan Lima Puluh	1	-	-	1
3	Kecamatan Marpoyan Damai	-	1	-	2
4	Kecamatan Payung Sekaki	3	2	-	-
5	Kecamatan Pekanbaru Kota	-	-	-	2
6	Kecamatan Rumbai	3	10	-	1
7	Kecamatan Rumbai Pesisir	2	-	-	2
8	Kecamatan Sail	3	-	-	1
9	Kecamatan Senapelan	-	1	-	1
10	Kecamatan Sukajadi	1	-	-	-
11	Kecamatan Tampar	-	2	2	5
12	Kecamatan Tenayan Raya	3	2	-	-
Jumlah		22	18	2	16

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

Selain adanya bencana banjir, kota Pekanbaru juga sering di landa bencana kebakaran lahan. Hal ini dapat di ketahui dari data berikut.

Tabel 2.

Jumlah Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Lahan Terbakar
1	2020	110,349 ha
2	2021	279,821 ha
3	2022	79,3875 ha
4	2023	16,872 ha

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan mengalami naik turun dari tahun 2020-2023. Kebakaran hutan paling luas terjadi pada tahun 2020 yaitu 279,821 ha, sedangkan kebakaran hutan paling sedikit terjadi pada tahun 2023 yaitu dengan luas 16,872 ha. Menurut peraturan Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan pasal 26 dijelaskan pula, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi

lingkungan hidup. Seperti halnya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adalah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Di tingkat nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru semakin meningkat, hal ini terlihat dari banyaknya bangunan yang ada di Kota Pekanbaru. Di satu sisi, hal ini berdampak positif karena Pekanbaru mengalami ekspansi infrastruktur yang pesat.

Tabel 3.

Tujuan, Sasaran, dan Program Kinerja Pelayanan BPBD Kota Pekanbaru 2023

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Mewujudkan pelayanan tanggap darurat bencana daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana Aparatur 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		Meningkatnya responsive penanganan bencana dan kebakaran lahan/hutan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
2	Mewujudkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat yang tangguh bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Sumber: Renja BPBD Kota Pekanbaru tahun 2023

Program yang di lakukan BPBD Kota Pekanbaru dalam rangka Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru.

Tabel 4.

Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru

No	Jenis Bencana	Program / Kegiatan yang di lakukan
1	Puting Beliung	1. Waspada apabila di langit tampak pertumbuhan awan putih yang berbentuk gerombolan berlapis-lapis 2. Mewaspadaai pembentukan awan ke awan hitam
2	Banjir	1. Membuang sampah pada tempatnya 2. Membuat saluran air yang baik 3. Memperbanyak lahan penyerapan air 4. Tidak membangun pemukiman di tepi sungai 5. Reboisasi tanaman khususnya yang dapat menyerap air 6. Tidak menebang pohon secara liar
3	Kebakaran hutan	1. Memperbanyak tata air di sekitar 2. Lakukan pembakaran terkendali untuk buka lahan 3. upaya deteksi melalui patroli dan peringatan dari pemerintah 4. melakukan peta perencanaan desa yang berisi pengelolaan dengan kebakaran

Sumber: Renja BPBD Kota Pekanbaru tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki tugas pokok sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai leading sector dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistic untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya. Terkait dengan program terdiri atas tahapan-tahapan penyelesaian serangkaian kegiatan dan memuat langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Ini adalah elemen pertama yang harus ada untuk mencapai implementasi program. Lebih lanjut Keban (2004:35) menyatakan: Efektif atau tidaknya program, standar evaluasi yang dapat digunakan adalah pengorganisasian, interpretasi dan implementasi. Disisi lain peneliti juga menemukan beberapa fenomena Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, di antaranya adalah sebagai berikut: Masih minimnya sarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sehingga sering melakukan peminjaman pada OPD lainnya Penanganan bencana masih belum maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia jika terjadi bencana dalam waktu bersamaan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

M. Rizki Setiawan dan Kartius

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

1295

Kata administrasi berasal dari kata *ad* dan *ministro* (bahasa Latin), yang berarti “melayani” atau “mengorganisasi”. Pengertian administrasi sederhana ini adalah suatu proses administrasi yang dilakukan oleh administrator secara berkala dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan akhir (Fathoni, 2006: 17). Dalam bahasa asalnya terbentuk kata benda *administration* dan kata sifat *administrativus*. Sedangkan dalam bahasa Inggris menjadi *administration* dan dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. (Hadari, 1994: 23) Secara konseptual administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit, diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha (*clerical work* dan *office work*) yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi.

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan (White dalam Waluyo, 2007: 35) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan menurut Kasim (1994: 8) menyatakan bahwa administrasi publik sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Proses administrasi sebagai proses politik juga dikemukakan oleh Dimock (1996: 40) merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa dipahami, karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Suradinata, 1993: 33)

Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli, 2009: 71).

Menurut Robbins (2003: 4), organisasi sebagai *a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goal* (sebagai entitas sosial sadar dikoordinasikan, dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi berfungsi atau dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan).

Menurut Dale dalam Subkhi dan Jauhar (2013:3), pengorganisasian adalah suatu proses perencanaan yang menyangkut persiapan, pengembangan dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja antar orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Sedangkan menurut Soffer dalam Subkhi dan Jauhar (2013:3), organisasi adalah perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian

kerja yang di dalamnya pekerjaan dipecah menjadi tugas-tugas, ditampilkan dan kemudian digabungkan lagi menjadi bentuk hasil yang berbeda.

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik adalah untuk melayani masyarakat. Mahsun (2009: 163) menyatakan bahwa organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure nonprofit organizations dan quasi nonprofit organizations. Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks.

Konsep Implementasi Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Riggs, 2005:54).

Menurut Nurdin Usman (2002: 170) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2004: 39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab (2004:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Proses implementasi kebijakan tidak lain mencakup pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan, dan kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya untuk mengubah atau menerjemahkan pernyataan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam program dan tindakan kritis serta untuk mengembangkan personel organisasi yang sesuai. bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan merancang layanan agar sesuai dengan kelompok sasaran dan untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Konsep Penanggulangan Bencana

Menurut Inggit Awalia Pratiwi (2021: 4) Secara umum upaya penanggulangan bencana meliputi hal-hal sebagai berikut: Kesiapsiagaan, suatu keadaan dimana setiap orang, aparatur, dan fasilitas pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) selalu siap untuk melakukan

tindakan dan menghadapi suatu bencana, baik sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya bencana.

Penanggulangan adalah upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tujuan dari upaya di atas ialah mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana: mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya: dan mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana. Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi potensi bencana yang frekuensinya terus menerus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak.

Konsep Bencana Banjir

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam serta faktor manusia, sehingga mengakibatkan kerugian manusia, kerusakan lingkungan hidup, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Nurjanah (2012:24) Banjir diartikan sebagai aliran udara diatas ketinggian normal yang membanjiri Sungai Purun sehingga mengakibatkan terbentuknya waduk di dataran rendah yang berdekatan dengan sungai. Banjir biasanya disebabkan oleh curah hujan di atas rata-rata. Akibatnya, sistem drainase yang ada dan sistem penampungan banjir buatan tidak mampu menyerap akumulasi air hujan sehingga mengakibatkan banjir. Disebutkan bahwa kapasitas sistem distribusi udara tidak selalu sama dan berubah karena faktor seperti penumpukan sedimen, fenomena penyempitan sungai akibat aktivitas manusia, dan penyumbatan akibat sampah dan penghalang lainnya.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (George C. Edward III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 149-154). Proses komunikasi pemerintahan diawali oleh pengirim (administrator atau manajer pemerintah) yang berusaha berkomunikasi dengan aparatur birokrasi, masyarakat dan

organisasi lain. Untuk itu dipilih seperangkat informasi sebagai pesan yang ingin dikirimkan (ideation). Ketika hendak mengirim informasi, pengirim menterjemahkan informasi tersebut dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang tepat yang diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh penerima dan diharapkan memiliki efek terhadap orang lain. Ekspresi gagasan atau ide dalam bentuk verbal (lisan dan tulisan), atau nonverbal (bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan, atau gambar), disebut pesan (message). Pesan yang disampaikan dapat berupa kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan.

Jadi komunikasi pemerintahan pada hakekatnya merupakan proses penyebaran dan pertukaran informasi di dalam dan dengan luar organisasi. Melalui komunikasi pemerintahan, maka eksekutif pemerintahan bertukar dan membagi informasi dengan yang lain, yaitu dengan legislatif, dengan staf, dengan pelaku bisnis, dan dengan masyarakat. Melalui komunikasi, eksekutif pemerintah atau administrator atau manajer pemerintah bermaksud untuk mempengaruhi sikap (attitude), pemahaman (understanding), dan perilaku (behavior) birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, tiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis merupakan bagian dari proses komunikasi pemerintahan, baik sebagai sender di satu waktu, dan di waktu lain ia menjadi receiver.

Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pada indikator komunikasi yaitu komunikasi berjalan dengan baik yakni dengan adanya transmisi komunikasi melalui koordinasi antar instansi dan menggunakan media sosial dan online.

Sumber Daya

Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial (George C. Edward III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 149-154). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 dalam kondisi sarana masih tergolong belum memadai dari sisi jumlah. Selain itu cukup banyak sarana yang berstatus pinjam dan rusak sehingga permasalahan sarana ini dapat mengganggu proses Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Menurut peneliti pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru masih perlu adanya peningkatan dari sisi sarana yang masih minim. Kebutuhan sarana yang diperlukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru lebih di utamakan pada sisi perlengkapan di lapangan seperti kebutuhan kendaraan dengan berbagai tipe dan jenis. Kemudian kebutuhan pada tenda yang sangat di butuhkan saat terjadi penanganan bencana di lapangan.

Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pada indikator sumber daya masih minim baik dari sisi sumberdaya uang yang masih mini, sumber

daya manusia yang kurang serta sumberdaya fasilitas banyak yang rusak dan status pinjam dari instansi lainnya.

Disposisi

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif (George C. Edward III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 149-154).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas) Polresta Pekanbaru. Rakor ini diselenggarakan di Ruangan Rapat BPBD Pekanbaru. Hal ini berisikan Penanganan kebencanaan sebaiknya dimulai dari hulu seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Agar penanggulangan bencana lebih efektif, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru harus bersinergi dengan Polri, TNI, Manggala Agni, dan lain-lain.

Dari hasil pengamatan peneliti diketahui bahwa dalam penanganan bencana di lapangan khususnya pada bencana banjir biasanya pada daerah rawan banjir sudah disediakan lokasi yang dapat di gunakan sebagai tempat pengungsian. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah penanganan bencana banjir khususnya pada daerah rawan banjir. Selain dengan menyediakan lokasi pengungsian pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru juga memberikan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pada indikator disposisi yaitu bentuk pengawasan dalam bentuk selalu melakukan rapat koordinasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja yang sudah di lakukan selain itu dari segi di lapangan di awasi oleh pimpinan dan masyarakat.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (George C. Edward III. Edward III dalam Agustino, 2008 : 149-154).

Proses pengambilan keputusan dalam Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru pengambilan keputusan tetap berada pada BPBD dengan melakukan koordinasi antar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru ataupun antar instansi. keputusan diambil dari rapat koordinasi yang dilakukan terkait kebencanaan dan darurat yang sedang terjadi selain itu para petugas lapangan bertugas berdasarkan arahan dari pimpinan setelah melakukan rapat

M. Rizki Setiawan dan Kartius

koordinasi. Berdasarkan hasil analisa pada hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan pada indikator Struktur birokrasi yaitu dalam hal penanganan kebencanaan dan darurat meskipun terkait pada instansi lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru tetap memberikan bantuan.

Dari hasil pengamatan dilapangan diketahui bahwa pertumbuhan pembangunan di Kota pekanbaru sedang berkembang, hal ini dapat terlihat dari banyak nya bangunan-bangunan yang berdiri di kota Pekanbaru. Di satu sisi hal tersebut memberikan dampak positif yang berarti pekanbaru mengalami pembangunan insfrastruktur yang berkembang dengan pesat. Hal ini didukung dengan ada beberapa program yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru sebagaimana uraian berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Meningkatnya responsive penanganan bencana dan kebakaran lahan/hutan
 - a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
3. Meningkatnya kapasitas masyarakat yang tangguh bencana
 - a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencan

Berdasarkan pengamatan di lapangan di ketahui bahwa terdapat beberapa temuan yaitu adanya hambatan dalam implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru

 1. Sumber daya manusia yang tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan kebencanaan
 2. Jumlah sumber daya manusia khususnya petugas lapangan yang masih belum memadai
 3. Minimnya jumlah sarana perlengkapan kebencanaan

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru diketahui bahwa:

1. Komunikasi dilakukan jika terjadi bencana, maka akan di adakan rapat dengan beberapa instansi terkait misal dengan pemerintah kota, forkompinda dan lain lain untuk membahas dan mengambil tindakan yang sebaiknya di lakukan.
2. Sumberdaya dari sisi sumber daya manusia belum ideal dari sisi jumlah dan dari sisi pendidikan tidak ada yang memiliki kependidikan kebencanaan sedangkan dari sisi fasilitas masih sangat kurang sehingga banyak fasilitas yang berstatus pinjam dari instansi lainnya.
3. Disposisi dilihat dari dukungan peningkatan sarana yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Program Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru

Struktur Birokrasi pembagian kewenangan secara mutlak beratnggung jawab untuk memberikan pertolongan kebencanaan di Kota Pekanbaru

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Dimock. E. Marshall. (1996). Administrasi Negara. Jakarta: Erlangga
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan. Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Guntur, Setiawan. (2004) .Implemen tasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka
- Nawawi, Hadari & Mimi Martini. (1994). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajahmada University
- Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,. Teori Dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Mahsun, Mohamad. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (3th ed). Yogyakarta: BPFE
- Nurdin Usman. (2002). Konteks Implementasi Berbasis krikulum. Jakarta: Grasindo
- Nurjannah, Dkk. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru
- Peraturan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang perkebunan
- Rachmat, Kriyanton. (2010(. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisas, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana

- Riggs, Fred W. (2005). *Administrasi Negara-negara. Berkembang- Teori Masyarakat Prismatis*. Jakarta: Rajawali
- Robbins, Stephen dan Judge. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Subkhi, Akhmad dan Moh. Jauhar. (2013). *Pengantar Teori Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi
- Sulistiyani. Rosidah. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suradinata, Ermaya. (1993). *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan*. Bandung: Mandar Maju
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung : Mandarmaju
- Zulkifli Amsyah. (2009). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation

- fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan
- M. Rizki Setiawan dan Kartius

- Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.

- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Priyadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.